



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangil sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Bangil yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Bangil adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bangil untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Bangil yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Bangil adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bangil untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Bangil yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Bangil adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bangil untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
KEC. BANGIL

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Bangil dalam menyusun Renja Kecamatan Bangil dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kec. Bangil disusun sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KEC. BANGIL;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. BANGIL;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Bangil berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Bangil wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Bangil dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Bangil wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Bangil;
- (2) Camat Bangil menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2024, Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Bangil Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 21

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Bangil, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kec. Bangil harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Bangil dan Renja Kecamatan Bangil, Kecamatan Bangil melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bangil dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bangil meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Bangil /lintas Renstra Kecamatan Bangil, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Bangil memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Bangil yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bangil Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 75

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BANGIL
TAHUN 2018 – 2023



JALAN MANGGA NO. 03 BANGIL PASURUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANGIL	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangil	5
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangil.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangil.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangil.....	17
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bangil.....	19
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	21
3.3 Telaah Renstra K/L.....	23
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	24
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	25
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bangil	28
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bangil.....	31
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII : PENUTUP.....	61

Lampiran : Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

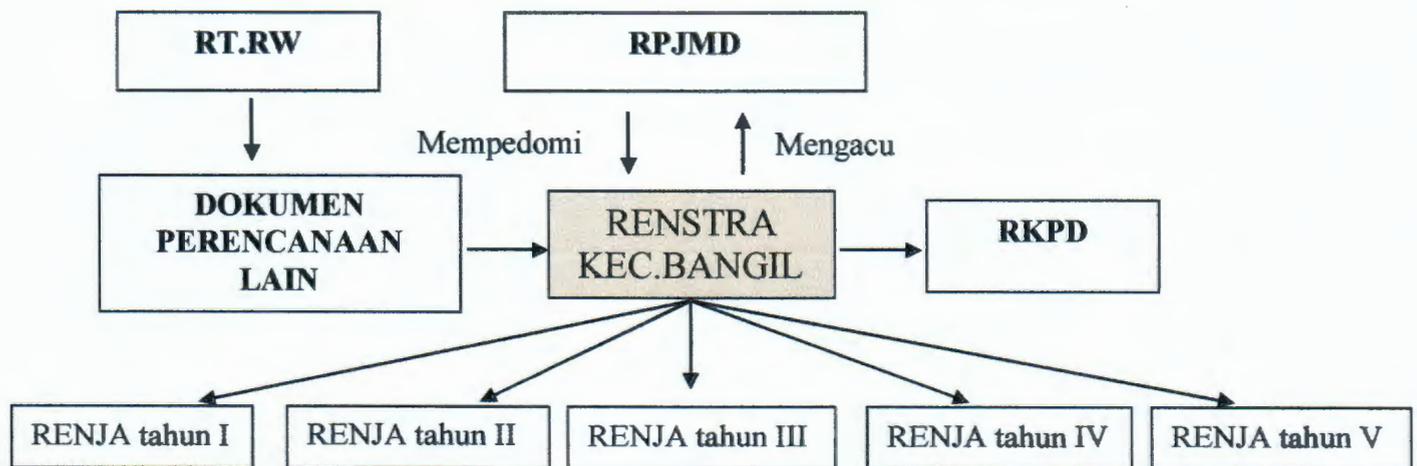
Renstra Perubahan Kecamatan Bangil Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bangil Tahun 2018 – 2023 (selanjutnya disebut Renstra Perubahan Kecamatan Bangil) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJM Daerah) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Bangil, maka disusunlah Renstra Kecamatan Bangil sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Bangil berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan 2018 – 2023.

Renstra Perubahan Kecamatan Bangil dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Bangil dalam Pembuatannya Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja lima tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



Pada pelaksanaannya terdapat perubahan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu maka perlu dilakukan terhadap Renstra Kecamatan Bangil.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

13. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/mk.02/2012, Nomor: 050/4379a/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemuthkiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07-MENKES N-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bangil adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita pembangunan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang dikhususkan pada tahun 2021 – 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bangil adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Bangil disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Rencana Strategis Kecamatan Bangil disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJMD Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode 2021 – 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANGIL

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangil
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangil
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangil
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangil

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bangil
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu –Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Bangil

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan Bangil dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1)Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.;
- (2)Untuk melaksanakan tugas,Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

- e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengumpulan, koordinasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas: menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- a. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi - Seksi

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;

- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

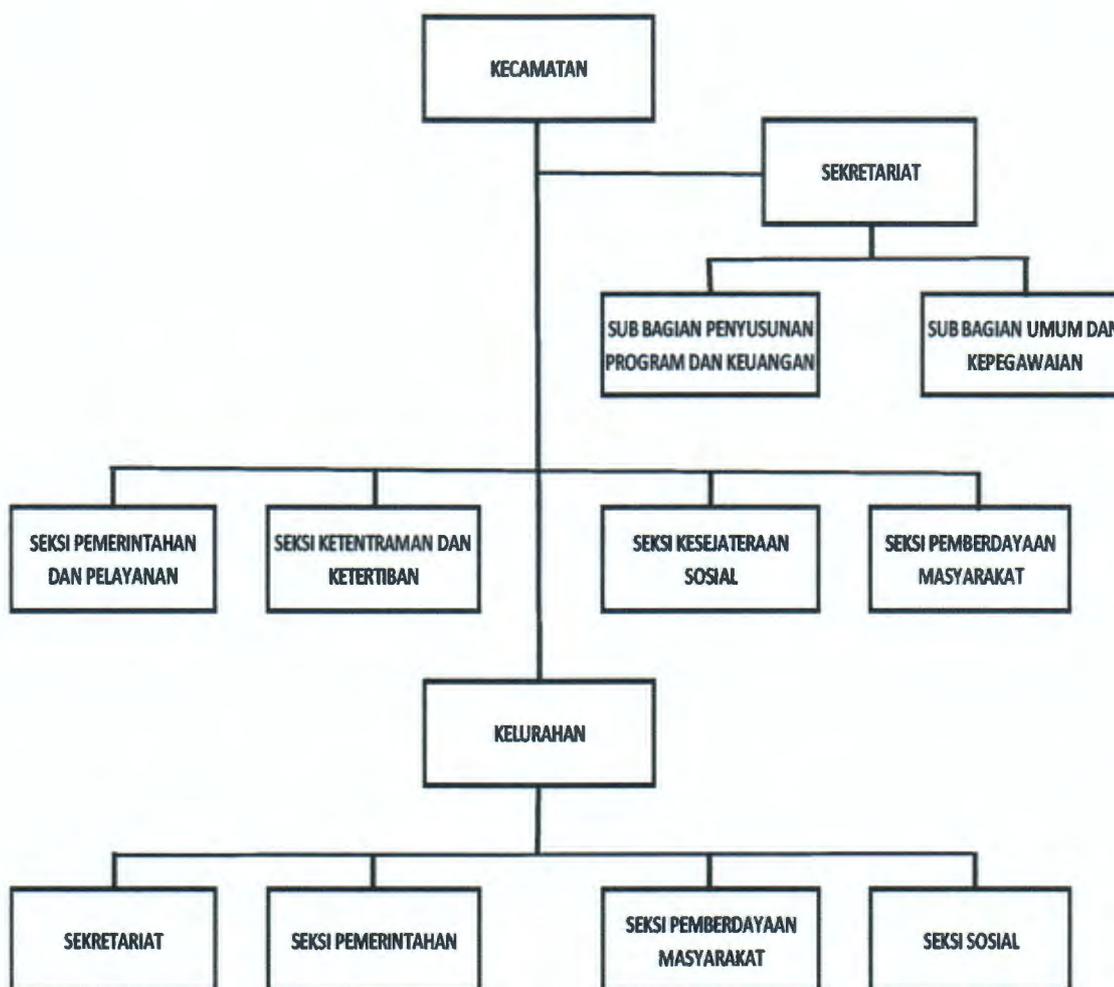
Kelurahan

Kelurahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016



2.2. Sumber Daya Kecamatan Bangil

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Bangil yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Bangil meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

a. Kepegawaian

Kepegawaian (Karyawan/ Karyawati) Kecamatan Bangil terdiri dari:

1. PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kecamatan Bangil, yang mana dapat dikelompokkan menurut jabatan dan Wilayah Kerja sebagai berikut :

No	Instansi	Nama	NIP	Jabatan
1	Kec. Bangil	Komari, SH.,MM	196609041987021004	Camat
2		Achmad Mulyono, s.Pd.,M.Pd	196603031990031008	Sekretaris Kecamatan
3		Tyas Andriani, S.KM	198504192010012019	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4		Syarif Yusuf, SH	198410102009011002	Kasubag Umum dan Kepegawaian

5		Haniatul Ma'rifa, SE	198805172010012008	Kasubbag Sungram dan Keuangan
6		Fairus Pagar Alam, SE	196802121990032006	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
7		Bakril S.S.Pd	196405021994121002	Kasi Kesejahteraan Sosial
8		Mokh. Ikhwan, SE	196406071985031008	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9		Dasuki	197302172007011009	Pengadministrasian Umum Kependudukan
10		Moh. Zairul	198304012009011005	Pengadministrasi Umum Kepegawaian
11		Hari indayati	196912152007012029	Pengadministrasian Keuangan
12		Abd Mutholib	196506052007011047	Pengadministrasi Umum Kependudukan
13		Sri Supadmi	196808212007012018	Pengadministrasian Keuangan
14		Mokh.Saekhu	197305252008011019	Pengadministrasian Umum Kepegawaian
15		Taufik Hidayat	197410292014061001	Pengemudi
16		Illah Billah	197104052014061001	Petugas Keamanan
17		Ery Wahyu Purnomo	197910072008011013	Pengadministrasian Umum dan kepegawaian
18	Kelurahan Bendomunggal	Ndon Sumarsono,	196708041989031007	Kepala Kelurahan
19		Siti Asia, SE	196911042007012018	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
20		Atik Hidajati	196506151986032010	Kasi Sosial
21	Kelurahan Dermo	Kuswati, SE	196508201988031004	Kepala Kelurahan
22		Ibrahim	197102051995031002	Sekretaris Kelurahan
23		Mukhamad Nur Wahyu Jatmiko,S.H	198510112009011002	Kasi Pemerintahan
24		Catur Wibowo	197706112014061001	Pengadministrasian umum
25	Kelurahan Gempeng	Didik Iswahyudi, S.Si	197702052008011014	Kepala Kelurahan
26		Moch. Edy Khoiron, SE	196911102008011016	Kasi. Pemerintahan
27		Darminto	196711241988031004	Kasi Sosial
28		Lilik Nadhiroh, SE	196804282007012014	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
29		Khiswatul Umroh	196810012007012017	Pengadministrasi Umum
30	Kelurahan Kalianyar	Pardjana, SE	197012311991031023	Kepala Kelurahan
31		Afief Hidayat, SH	197501252007011008	Kasi Pemebrdayaan Masyarakat
32		Moch Sueb	196509302008011007	Pengadministrasian Umum
33	Kelurahan Kalirejo	Drs. Hufron Fanani	196610051989031020	Kepala Kelurahan
34		Kasan	196903081989031007	Sekretaris Kelurahan
35		Fauziah, S.Pd	196604021986022003	Kasi Sosial
36	Kelurahan Kauman	Budi Mulyono, SE		Kepala Kelurahan
37		Khusnul Abadi,SE	197706142007011016	Kasi Sosial
38		Adi Purnomo	196703131988031006	Kasi Pemberdayaan

				Masyarakat
39	Kelurahan Kersikan	Moch Safuan,SE	196407051991031014	Kepala Kelurahan
40		Dewi Kurnia Yayuk, SE	196804182007012023	Sekretaris Kelurahan
41		Andita Kuswardati Puspitasari,SH	196506101986032022	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
42	Kelurahan Kiduldalem	Lutfianti, SE	197203032007012021	Kepala Kelurahan
		Miftakhul Jannah,SH	197905282007012006	Sekretaris Lurah
43		Choirul Aqsah, SE	197211082007012015	Kasi Pemerintahan
44		Indra Bagus Trijunilestari Ady, S.Sos	197806172008011007	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
45	Kelurahan Kolursari	Suwanto, SH	197803012007011009	Kepala Kelurahan
46		Ribut Suharti,SE	196702231989032008	Sekretaris Kelurahan
47		Nur Wahyuningsih, SE	197001192007012010	Kasi Sosial
48	Kelurahan Latek	Sujarno, ST	196910301994031006	Kepala Kelurahan
49		Tri Indra Wahyudi	197204251996021001	Sekretaris Kelurahan
50		Sri Kartika Wutanti, SE	197904092007012011	Kasi Sosial
51		Gatot Hartono	197202102007011019	Pengadministrasian Kesra
52	Kelurahan Pogar	Moh. Shodiq, SE	197103072007011017	Kepala Kelurahan
53		Ferdinand Wibawanto	197304131997031008	Kepala Seksi Pemerintahan
54		Nafianik	196811051989082002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
55		Heru Sukoco	197210282007011017	Pengadministrasian Umum
56		Lailatul Rifah	197102112009062001	Pengadministrasi Umum

2. Menurut tingkat golongan kepangkatan dapat dilihat sebagai berikut:

No	Pangkat/ Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/a	2	-	2
2	III/d	8	6	14
3	III/c	9	2	11
4	III/b	5	8	13
5	III/a	4	1	5
6	II/d	7	3	10
7	II/c	-	1	1
8	II/b	1	-	1
9	II/a	1	-	1
10	I/d	1	-	1

11	I/c	-	-	-
12	I/b	1	-	1
13	I/a	-	-	-

3. Menurut Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)	3	1	4
2	Strata satu (S1)	18	14	32
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	15	6	21
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	-	2
5	Sekolah Dasar (SD)	1	-	1

4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Bangil berjumlah 4 (empat) orang.

b. Perlengkapan

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di Kecamatan Bangil meliputi :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Dinas	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	6 Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda Tiga	1 Unit	Baik
4	Komputer PC	10 Unit	Baik
5	Laptop	7 Unit	Baik
6	Printer	8 Unit	Baik
7	Printer Dot Matrix	2 Unit	Baik
8	LCD Proyektor	2 Unit	Baik
9	Meja Kerja	10 Buah	Baik
10	Meja Rapat	10 Buah	Baik
11	Kursi Kerja Pejabat	9 Buah	Baik
12	Kursi Rapat Stainlist	50 Buah	Baik

13	Kursi Rapat Plastik	50 Buah	Baik
14	Kursi Tunggu Stainlist	1 Buah	Baik
15	Sofa	3 Unit	Baik
16	AC	15 Unit	Baik
17	Karpet	1 Buah	Baik
18	Lemari Es	1 Unit	Baik
19	Showcase	1 Unit	Baik
20	Televisi	1 Unit	Baik
21	Soundsystem	2 Unit	Baik
22	Tempat Tidur	1 Unit	Baik
23	Lemari Baju	1 Unit	Baik
24	Lemari Arsip	10 Unit	Baik
25	Rak Buku	2 Unit	Baik
26	Etalase	1 Unit	Baik
28	Getset/ Generator	1 Unit	Baik
29	Mesin Pompa Air	2 Buah	Baik
30	Mesin Potong Rumput	1 Buah	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangil

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa/Kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan Sumber Daya Manusia yang proporsional, sarana prasarana, sumber anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum maksimal.

Kinerja Kantor Kecamatan Bangil tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang sudah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan;
4. Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah.

Adapun Pencapaian target kinerja Kecamatan Bangil tampak dalam tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Ke-					Realisasi Capaian Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi				Baik	Baik	Baik			Baik	Baik	Baik			Baik	Baik	Baik			
2	Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang terfasilitasi				90	95	95			93%	95%	95%			1%	1%	1%			
3	Persentase Desa/Kelurahan yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan				90	90	90			90%	90%	90%			1%	1%	1%			
4	Persentase Kasus Kantrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan				90	90	90			90%	90%	90%			1%	1%	1%			
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							85	87,00				85	87,28					100,00	100,32
								Baik	Baik				Baik	Baik					Baik	Baik
6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)							63,36	69				63,36	68,88					100,00	99,83
								Baik	Baik				Baik	Baik					Baik	Baik

Berdasarkan pada Uraian pada tabel diatas maka dapat kami uraikan capaian kinerja Kecamatan Bangil cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Pengukuran kinerja dilakukan bertujuan adalah agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Realisasi Kinerja dengan Target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi Tahun bersangkutan dengan realiasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
3. Untuk mengetahui Perbandingan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Kecamatan Bangil dengan Kecamatan lain se - wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Untuk Mengetahui Perbandingan Realisasi Kinerja dengan dengan standar nasional.

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bangil dapat di Lihat Pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN BANGIL
 KABUPATEN PASURUAN

URAIAN PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	436.835.000,00	576.590.000,00	731.120.000,00	753.990.000,00	780.709.956,75	432.927.594,00	528.238.097,00	723.159.257,00	750.068.735,00	751.801.929,00	99,11	91,61	98,91	99,48	96,30	0,16	0,15
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	442.875.500,00	394.770.000,00	424.871.800,00	295.734.798,00	351.881.999,00	437.313.700,00	383.038.500,00	417.579.725,00	276.145.378,00	323.388.150,00	98,74	97,03	98,28	93,38	91,90	-0,06	-0,07
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	514.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	0,00
PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN EKONOMI	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	43.050.000,00	30.000.000,00	23.750.000,00	-	-	38.732.500,00	28.750.000,00	23.750.000,00	-	-	89,97	95,83	100,00	-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM PEMBINAAN KEHIDUPAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	11.000.000,00	10.600.000,00	16.585.000,00	-	-	11.000.000,00	9.500.000,00	16.335.000,00	-	-	100,00	89,62	98,49	-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	5.700.000,00	5.700.000,00	7.000.000,00	-	-	2.250.000,00	5.700.000,00	6.500.000,00	-	-	39,47	100,00	92,86	-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	12.250.000,00	12.250.000,00	7.000.000,00	-	-	10.750.000,00	10.950.000,00	6.750.000,00	-	-	87,76	89,39	96,43	-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAN JENDER	43.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	-	-	40.000.000,00	16.150.000,00	14.000.000,00	-	-	93,02	80,75	100,00	-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	-	14.000.000,00	-	-	-	-	13.790.000,00	-	-	-	-	98,50	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	1.636.900.000,00	2.007.600.000,00	2.653.800.000,00	1.327.599.202,00	-	1.624.872.211,00	1.963.914.540,00	2.584.870.654,00	1.321.594.655,00	-	99,27	97,82	97,40	99,55	-	-1,00	-1,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	24.500.000,00	45.045.455,00	8.815.000,00	-	-	20.500.000,00	41.571.000,00	8.815.000,00	-	-	83,67	92,29	100,00	-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	5.140.000,00	-	40.220.000,00	-	-	5.140.000,00	-	40.220.000,00	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-1,00	-1,00
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	220.455.000,00	-	-	-	-	183.532.000,00	-	-	-	-	83,25	-	0,00	0,00
PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	-	-	-	43.604.000,00	-	-	-	-	35.500.000,00	-	-	-	-	81,41	-	0,00	0,00
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	63.400.000,00	-	-	-	-	59.760.000,00	-	-	-	-	94,26	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	-	-	-	12.904.672.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	-	-	-	-	12.197.060.973,00	-	-	-	-	1.626.920.294,00	-	-	-	-	13,34	0,00	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	-	-	-	-	90.910.000,00	-	-	-	-	55.580.000,00	-	-	-	-	61,14	0,00	0,00
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	-	-	-	-	56.085.000,00	-	-	-	-	30.885.000,00	-	-	-	-	55,07	0,00	0,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangil

Dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan, Kecamatan Bangil perlu memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan daerah. Standar Operasional Prosedur(SOP) Kecamatan Bangil sebagai berikut :

Tabel
Daftar Standar Operasional Prosedur(SOP) Kecamatan Bangil

SETELAH PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN		
NO	UNIT	JUDUL SOP	NO	UNIT	JUDUL SOP
1	SEKRETARIAT	Pengelolaan Surat Masuk	1	SEKRETARIAT	Pengelolaan Surat Masuk
2		Pengelolaan Surat Keluar	2		Pengelolaan Surat Keluar
3		Kenaikan Gaji Berkala	3		Kenaikan Gaji Berkala
4		Kenaikan Pangkat	4		Kenaikan Pangkat
5		Pengelolaan Cuti	5		Pengelolaan Cuti
6		Pembuatan Recana Kerja (RENJA)	6		Pembuatan Recana Kerja (RENJA)
7		Pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	7		Pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
8		Pengelolaan Pencairan Anggaran UP	8		Pengelolaan Pencairan Anggaran UP
9		Pengelolaan Pencairan Anggaran GU	9		Pengelolaan Pencairan Anggaran GU
10		Pengelolaan Pencairan Anggaran LS	10		Pengelolaan Pencairan Anggaran LS
11		Pengelolaan Pencairan Anggaran Gaji	11		Pengelolaan Pencairan Anggaran Gaji
12		Rekomendasi Surat Jalan/Bepergian	12		
13		Rekomendasi Persyaratan Pendaftaran Pegawai	13		
14	SEKSI KEMASYARAKATAN	Pelayanan Rekomendasi Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)	14	SEKSI KEMASYARAKATAN	Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran
15		Pelayanan Rekomendasi Proposal bantuan sosial/keagamaan	15		Pelayanan Surat Pernyataan Miskin
16		Pelayanan Surat Dispensasi Nikah	16		Pelayanan Surat Rekomendasi Pengajuan Bantuan Keagamaan
17		Monitoring Penyaluran Raskin	17		Monitoring Raskin
18	SEKSI PEMERINTAHAN	Pelayanan Rekomendasi Permohonan Akta Kelahiran	18	SEKSI PEMERINTAHAN	Pelayanan Surat Pengantar KTP
19		Pelayanan Surat Pengantar Permohonan KK	19		Pelayanan Surat Pengantar KK
20		Pelayanan surat Pengantar Pembuatan KTP	20		Pelayanan Surat Keterangan Pindah
21		Pelayanan Surat Pengantar Pindah	21		
22		Rekomendasi surat keterangan waris	22		
23		Rekomendasi SKCK	23		
24		Pelayanan Legalisir KTP	24		
25		Pelayanan Legalisir KK	25		
26	SEKSI PEMBANGUNAN	Pelayanan Permohonan IMB	26	SEKSI PEMBANGUNAN	Pelayanan Permohonan IMB
27		Pelayanan Rekomendasi Permohonan SIUP	27		Musrenbang
28		Pelayanan Rekomendasi Keterangan Domisili Usaha	28		Pelayanan Permohonan SIUP
29		Pelayanan Rekomendasi Permohonan IMB	29		
30		Pelayanan Rekomendasi HO	30		
31		Pelayanan Rekomendasi Ijin Lokasi	31		
32		Musrenbang Tingkat Kecamatan	32		
33	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Pelayanan Ijin Reklame Insidentil	33	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Pelayanan Ijin Reklame
34		Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian/Hiburan	34		Pelayanan Ijin Keramaian
35		Pelayanan Ijin Peternakan Rakyat/Kemitraan	35		
36		Pelayanan Ijin Usaha Panggilan Padi	36		
37		Pelayanan Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten selain untuk kepentingan lalu lintas	37		

Dari daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) di atas Kecamatan Bangil perlu mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi guna untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bangil yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Diantara item-item tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
<p>1. Kecamatan Bangil merupakan daerah Pusat Pemerintahan Kab. Pasuruan. PP No.27 Tahun 2016 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan Dari Wilayah Kota Pasuruan Ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Tuntutan Masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik.</p> <p>3. Masyarakat wilayah kec. Bangil yang terdiri dari berbagai umat beragama dan etnis.</p> <p>4. Daerah rawan banjir.</p> <p>5. Semakin Transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran serta Kecamatan Bangil menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.</p> <p>6. Masyarakat semakin kritis dan aktif terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.</p>	<p>1. Pengembangan infrastruktur dan administrasi pemerintah Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bangil dengan baik.</p> <p>2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas.</p> <p>3. Melibatkan peran serta Masyarakat yang aktif dalam pembangunan daerah.</p> <p>4. Mewujudkan stabilitas wilayah baik keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Muspika dan OPD terkait.</p> <p>5. Kemudahan Mengakses Informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan Teknologi Informasi.</p> <p>6. Melibatkan peran serta masyarakat yang aktif dalam pembangunan daerah.</p>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BANGIL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bangil

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN

Diidentifikasi permasalahan yaitu:

- Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu; Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPD;
- Belum semua Kelurahan / Desa yang administrasi pengelolaannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah nya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan

3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes	Belum optimalnyalaporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua Kelurahan / desa Mempunyai administrasi yang baik	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungansekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 adalah: “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera dan berdaya saing”. Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan prproduk-produk unggulan kabupaten pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekenomi desa menuju kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya guna mewujudkan kasi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di kabupaten pasuruan terutama pelayanan kesehatan dan pemukiman;
3. Memanfaatkan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di kabupaten pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Melakukan strategi peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektifitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan sembari menjamin terselenggaranya integrasi antara pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di kabupaten pasuruan.

Sebagai salah satu OPD, maka Kecamatan Bangil berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan perundangan yang berlaku. Dari misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang Kecamatan Bangil adalah misi nomor 4, sehingga Kecamatan Bangil akan berusaha untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Bangil yang profesional, bersih, transparan, dan responsif dan mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Bangil yang aman, tenteram, religius, harmonis, serta berkebudayaan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang Masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinegritas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan dan kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan Bangil adalah Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2020 tentang rencana strategis kementrian dalam negeri tahun 2020-2024, diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan antara lain:

- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bangil berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada	Motivasi serta metode kerja yang sistematik sesuai dengan pembagian tupoksi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 200-2029. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusiadan makhluklain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tersebut Kecamatan Bangil merupakan salah satu dari Kawasan Perkotaan yang ada di Kabupaten Pasuruan serta sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga telaahan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bangil ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Bangil. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Bangil dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Bangil dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, dan program di Kecamatan Bangil.

Kecamatan Bangil adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan wilayah yang strategis menjadikan Kecamatan Bangil sebagai Kecamatan yang pesat perkembangannya. Apalagi ditunjang dengan Banyaknya *Home Industri Bordir* dengan sebutan Bangil Kota Bordir (Bang Kodir), Home Industri kerajinan emas dan perak dan sebagian wilayah yang menghasilkan hasil budi daya ikan payau menjadikan Kecamatan Bangil kaya dengan Wirausaha mandiri dari masyarakat, serta Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Bangil sebagai acuan Wilayah Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Bangil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Bangil ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bangil dari Implikasi Rencana
Tata Ruang Wilayah

No	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN BANGIL	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Pelatihan pengoperasian Komputer bagi pegawai, personil dan Tenaga Operasional	Banyak pegawai, Personil dan tenaga operasional kurang menguasai computer	Tidak bisame Ngoperasikank omputer dalam melaksanakan pekerjaan	Dengan adanya Pelatihan komputer, pegawai dapat menggunakan computer dalam
2	Penambahan Personil pengelola disetiap seksi	Banyak tenaga yang merangkap tugas lain.	Setiap seksi tidak mem-punyai personil dan tenaga operasional	Dengan adanya personil dan tenaga operasional disetiap seksi pelaksanaan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah, Kecamatan Bangil merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi pendukung lainnya. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh factor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bangil sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan. Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut seringkali mengalami distorsi.
- b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

c. Adanya Bencana Non Alam (Pandemi Covid-19)

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan Karantina Wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah Propinsi, Kabupaten atau Kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintahan dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif tahun 2020. Untuk itu Pemerintah berupaya mengagendakan Kebijakan Normal baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan program, target dan *major projects* di RPJMD. Yang mana dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengalihan terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan, yang mana telah di yang mana telah di tuangkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dalam rangka menangani wabah Covid-19.

Disamping faktor eksternal, juga terdapat beberapa factor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bangil. Keberadaan sumber daya Kecamatan Bangil yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Bangil:

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal). Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana

dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.

2. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja.
Keterbatasan anggaran di beberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan. Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program – program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bangil

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.Kecamatan Bangil menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut:

“ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Bangil yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Akan tetapi pada tahun 2021 terdapat Rentra Perubahan sehingga tujuan atas penjabaran misi yang akan di capai berubah menjadi :

“ Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima”

Dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan pembinaan Desa/ Kelurahan;
3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan;
4. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah.

Yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bangil

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		6	7	8	9
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87	87.5	88	88.5
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	63.36	69	70	76	80

Tabel 4.1 (Perubahan)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bangil

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	n/a	n/a	87.5%	88%	88.5%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah	Persentase Desa/ Kelurahan yang telah dibina.	n/a	n/a	55%	58%	60%

		Desa/ Kelurahan.						
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan.	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan.	n/a	n/a	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	63,36	69	70	76	80

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bangil

Rumusan Tujuan dan Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bangil, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Bangil

VISI : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima			
MISI ke- 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis pada teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan secara responsif, transparan, murah, cepat, Tepat dan Akuntabel	Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis pada teknologi
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan, Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa/Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan.	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan.	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum, Adanya Penerapan Penagakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan	Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang ada di Renstra Perubahan ini diarahkan untuk tujuan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan. Pada Tahun 2023 Kecamatan Bangil Mengajukan Permohonan Pembangunan Gedung Serbaguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan dengan pagu anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Bangil sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
- Pengadaan Meubeleir;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. PROGRAM KEGIATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan

- Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.
- ### **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- Kegiatan: Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan:

- Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan: Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan:

- Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM

Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum

Sub Kegiatan:

- Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan:

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. KELURAHAN

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bedomungal;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dermo;

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gempeng;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalianyar;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalirejo;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kersikan;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kiduldalem;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolursari;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Latek;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pogar.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan:

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bedomungal;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bedomungal;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gempeng;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalianyar;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirejo;

- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kersikan;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kiduldalem;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kolursari;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Latek;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pogar.

Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan :

- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Bendomungal);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dermo);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Gempeng);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kalinyar);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kalirejo);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kauman);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kersikan);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kiduldalem);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kolursari);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Latek);
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Pogar).

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrriban Umum

Sub Kegiatan:

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bendomungal;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Dermo;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Gempeng;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kalianyar;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kalirejo;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kauman;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kersikan;

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kiduldalem;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kolursari;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Latek;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pogar.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Bangil

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab					
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan						63,36	1.049.724.798,00	64	1.132.591.955,75										KECAMATAN BANGIL	
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		100%	753.990.000,00	100%	780.709.956,75									100%	1.534.899.956,75	KECAMATAN BANGIL	
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone		48 Rekening-Bulan	58.800.000,00	48 Rekening-Bulan	61.200.000,00										48 Rekening-Bulan	120.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Bapelaluh Keuangan		96 Orang-Bulan	49.080.000,00	96 Orang-Bulan	59.280.000,00										96 Orang-Bulan	108.360.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan		60 Orang-Bulan	87.000.000,00	60 Orang-Bulan	87.000.000,00										60 Orang-Bulan	174.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK		4 kali	20.000.000,00	4 kali	20.618.956,25										8 kali	40.618.956,25	KECAMATAN BANGIL
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan		4 Eksemplar	15.025.000,00	4 Eksemplar	15.025.000,00										8 Eksemplar	30.050.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu		12 Kali	57.025.000,00	12 Kali	50.526.000,50										24 Kali	107.551.000,50	KECAMATAN BANGIL
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah		12 Kali	100.000.000,00	12 Kali	81.000.000,00										24 Kali	181.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor Tenaga Kontrak / THL		204 Orang-Bulan	367.060.000,00	204 Orang-Bulan	394.060.000,00										204 Orang-Bulan	761.120.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan		0		8 unit	12.000.000,00										8 unit	12.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		100%	295.734.798,00	1,00	351.881.999,00										1,00	647.616.797,00	KECAMATAN BANGIL
				Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Pengadaan		0		1 Paket	50.000.000,00										1 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		1 Paket	22.000.000,00	1 Paket	23.300.000,00										2 Paket	45.300.000,00	KECAMATAN BANGIL
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		1 Paket	113.418.798,00	1 Paket	128.270.000,00										2 Paket	241.688.798,00	KECAMATAN BANGIL		
		Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair		1 Paket	60.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00										2 Paket	70.000.000,00	KECAMATAN BANGIL		
		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan		1 Paket	12.750.000,00	1 Paket	55.311.999,00										2 Paket	68.061.999,00	KECAMATAN BANGIL		
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan		1 Paket	78.000.000,00	1 Paket	78.000.000,00										2 Paket	156.000.000,00	KECAMATAN BANGIL		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										unit Kerja Penanggung Jawab		
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan		1 Paket	9.566.000,00	1 Paket	7.000.000,00							2 Paket	16.566.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Nilai Indeks Penguasaan Masyarakat			85	14.518.340.202,00	87,00	0,00	87,5	-	88		88,5		88,5		KECAMATAN BANGIL
				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Nilai IKM Kecamatan		85	14.000.000,00									85,5	14.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan		8 Orang	14.000.000,00									8 Orang	14.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Nilai IKM Kecamatan		85	9.010.000,00									88,5	9.010.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Fasilitasi Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		1 Kali	5.010.000,00									1 Kali	5.010.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		1 Kali	4.000.000,00									1 Kali	4.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	Nilai IKM Kecamatan		85	1.327.599.202,00									85	1.327.599.202,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	149.737.500,00									12 Kali	149.737.500,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kersikan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	108.015.000,00									12 Kali	108.015.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kauman	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	137.555.000,00									12 Kali	137.555.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Bedomunggal	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	121.440.000,00									12 Kali	121.440.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Gempeng	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	124.125.000,00									12 Kali	124.125.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pogar	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	130.050.000,00									12 Kali	130.050.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kolursari	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	133.595.085,00									12 Kali	133.595.085,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Dermo	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	99.509.986,00									12 Kali	99.509.986,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kalirejo	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	116.100.000,00									12 Kali	116.100.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Latek	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	94.200.000,00									12 Kali	94.200.000,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kallanyar	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	113.271.631,00									12 Kali	113.271.631,00	KECAMATAN BANGIL
				PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Nilai IKM Kecamatan		85	220.455.000,00									85	220.455.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	195.725.000,00									12 Kali	195.725.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		12 Kali	24.730.000,00									12 Kali	24.730.000,00	KECAMATAN BANGIL
				PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Nilai IKM Kecamatan		85	43.604.000,00									85	43.604.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		2Kegiatan	43.604.000,00									2 Kegiatan	43.604.000,00	KECAMATAN BANGIL
				PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah masalah yang di tangani		100%	63.400.000,00									100%	63.400.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Jumlah Koordinasi		6 Kali	63.400.000,00									6 Kali	63.400.000,00	KECAMATAN BANGIL
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMRINTAHAN	Nilai IKM Kecamatan		85	12.904.672.000,00									85	12.904.672.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	1.050.032.000,00									1 Paket	1.050.032.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	809.000.000,00									1 Paket	809.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	1.116.162.000,00									1 Paket	1.116.162.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	932.500.000,00									1 Paket	932.500.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	900.000.000,00									1 Paket	900.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	1.084.592.000,00									1 Paket	1.084.592.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	1.048.150.000,00									1 Paket	1.048.150.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	1.116.162.000,00									1 Paket	1.116.162.000,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	882.752.000,00									1 Paket	882.752.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	773.152.000,00									1 Paket	773.152.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kallanyar	Jumlah Sarpras yang dibangun		1 Paket	1.021.782.000,00									1 Paket	1.021.782.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	123.120.000,00									1 Paket	123.120.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kersikan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	364.152.000,00									1 Paket	364.152.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	56.990.000,00									1 Paket	56.990.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	240.652.000,00									1 Paket	240.652.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gempeng	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	273.152.000,00									1 Paket	273.152.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pogar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	88.560.000,00									1 Paket	88.560.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kolursari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	125.002.000,00									1 Paket	125.002.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	56.990.000,00									1 Paket	56.990.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	290.400.000,00									1 Paket	290.400.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Latek	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	400.000.000,00									1 Paket	400.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kallanyar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		1 Paket	151.370.000,00									1 Paket	151.370.000,00	KECAMATAN BANGIL
				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai IKM Kecamatan		85	0,00	87,00	12.197.060.973,00	87,5		88		88,5		88,50	12.197.060.973,00	KECAMATAN BANGIL
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				2 Kegiatan	28.400.000,00							2 Kegiatan	28.400.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Sumberdaya Aparatur Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				2 Kali	5.010.000,00							2 Kali	5.010.000,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi				2 Kali	4.000.000,00							2 Kali	4.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	142.460.000,00							12 Kali	142.460.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kersikan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	122.200.000,00							12 Kali	122.200.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kauman	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	119.900.000,00							12 Kali	119.900.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Bedomunggal	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	112.400.000,00							12 Kali	112.400.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Gempeng	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	132.200.000,00							12 Kali	132.200.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pogar	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	132.012.000,00							12 Kali	132.012.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kolursari	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	125.040.000,00							12 Kali	125.040.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Dermo	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	113.000.000,00							12 Kali	113.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kallrejo	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	112.500.000,00							12 Kali	112.500.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Latek	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	113.640.000,00							12 Kali	113.640.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kalianyar	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi				12 Kali	116.960.000,00							12 Kali	116.960.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	885.706.000,00							1 Paket	885.706.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	889.336.000,00							1 Paket	889.336.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	935.941.000,00							1 Paket	935.941.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bedomunggal	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	557.369.000,00							1 Paket	557.369.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	921.560.973,00							1 Paket	921.560.973,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	910.519.000,00							1 Paket	910.519.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	790.069.000,00							1 Paket	790.069.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	895.559.000,00							1 Paket	895.559.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	821.295.000,00							1 Paket	821.295.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	885.920.000,00							1 Paket	885.920.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar	Jumlah Sarpras yang dibangun				1 Paket	879.397.000,00							1 Paket	879.397.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	107.205.000,00							1 Paket	107.205.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kersikan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	94.300.000,00							1 Paket	94.300.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	56.553.000,00							1 Paket	56.553.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bedomunggal	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	431.090.000,00							1 Paket	431.090.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gempeng	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	66.000.000,00							1 Paket	66.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pogar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	34.325.000,00							1 Paket	34.325.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kolursari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	200.720.000,00							1 Paket	200.720.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	94.000.000,00							1 Paket	94.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	166.000.000,00							1 Paket	166.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Latek	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	87.269.000,00							1 Paket	87.269.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalianyar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				1 Paket	107.205.000,00							1 Paket	107.205.000,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												unit Kerja Penanggung Jawab			
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina				1,00	90.910.000,00							1,00	90.910.000,00	KECAMATAN BANGIL			
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Fasilitasi						12 Kali	41.450.000,00							12 Kali	41.450.000,00	KECAMATAN BANGIL	
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan							12 Kali	49.460.000,00							12 Kali	49.460.000,00	KECAMATAN BANGIL
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan		100%	0,00	1,00	56.085.000,00										1,00	56.085.000,00	KECAMATAN BANGIL
				Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi								6 Kali	56.085.000,00							6 Kali	56.085.000,00
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berualitas					n/a	0,00	n/a	0,00	87,5	3.468.076.481,00	88		88,5		88,5	3.468.076.481,00	KECAMATAN BANGIL			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik							100%	3.468.076.481,00						100%	3.468.076.481,00	KECAMATAN BANGIL		
		7.01.02.0.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kecamatan							100%	3.436.522.211,00							100%	3.436.522.211,00	KECAMATAN BANGIL	
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan di Tingkat Kecamatan																		
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/ Sosialisasi/ Pembinaan								2 Kegiatan	29.580.350,00						2 Kegiatan	29.580.350,00	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bedomunggal	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	294.392.361,00						12 Bulan	294.392.361,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dermo	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	302.793.493,00						12 Bulan	302.793.493,00	KELURAHAN DERMO	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gempeng	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	321.397.450,00						12 Bulan	321.397.450,00	KELURAHAN GEMPENG	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kalianyar	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	308.201.472,00						12 Bulan	308.201.472,00	KELURAHAN KALIANYAR			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab					
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalirejo	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan						12 Bulan	302.199.720,00					12 Bulan	302.199.720,00	KELURAHAN KALIREJO				
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan							12 Bulan	300.376.780,00						12 Bulan	300.376.780,00	KELURAHAN KAUMAN		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kersikan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	308.198.619,00						12 Bulan	308.198.619,00	KELURAHAN KERSIKAN	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	333.391.068,00						12 Bulan	333.391.068,00	KELURAHAN KIDULDALEM	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolursari	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	314.799.133,00						12 Bulan	314.799.133,00	KELURAHAN KOLURSARI	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Latek	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	302.199.620,00						12 Bulan	302.199.620,00	KELURAHAN LATEK	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pogar	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan								12 Bulan	318.992.145,00						12 Bulan	318.992.145,00	KELURAHAN POGAR	
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Peningkatan SDM bagi Perangkat Desa									100%	31.554.270,00						100%	31.554.270,00	KECAMATAN BANGIL
					Persentase Peningkatan SDM bagi ASN																		
					Persentase meningkatnya tertib administrasi Keuangan Kelurahan																		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/ Sosialisasi/ Pembinaan								5 Kegiatan	31.554.270,00					5 Kegiatan	31.554.270,00	KECAMATAN BANGIL				
	Persentase Desa/ Kelurahan yang telah dibina						n/a	0,00	n/a	0,00	55%	6.170.591.975,00	58%		60%		60%	6.170.591.975,00	KECAMATAN BANGIL				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/ Kelurahan yang terbina dengan baik								100%	6.170.591.975,00					100%	6.170.591.975,00	KECAMATAN BANGIL				
			Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina								100%						100%						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi/ Kegiatan sosialisasi kemasyarakatan						2 Kali	55.614.550,00					2 Kali	238.893.450,00	KECAMATAN BANGIL
					Jumlah Koordinasi/Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)						12 Kali						12 Kali		
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/ Sosialisasi/ Pembinaan						12 Kali	238.893.450,00					12 Kali	238.893.450,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Tingkat Kelurahan						100%	6.114.977.425,00					100%	6.114.977.425,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Bedomunggal	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	177.382.385,00					1 Paket	177.382.385,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	199.943.700,00					1 Paket	199.943.700,00	KELURAHAN DERMO
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	581.308.033,00					1 Paket	581.308.033,00	KELURAHAN GEMPENG
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	476.577.224,00					1 Paket	476.577.224,00	KELURAHAN KALINYAR
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	216.960.000,00					1 Paket	216.960.000,00	KELURAHAN KALIREJO
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	264.979.799,00					1 Paket	264.979.799,00	KELURAHAN KAUMAN
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	361.033.317,00					1 Paket	361.033.317,00	KELURAHAN KERSIKAN
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	309.760.000,00					1 Paket	309.760.000,00	KELURAHAN KIDULDALAM
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	354.749.560,00					1 Paket	354.749.560,00	KELURAHAN KOLURSARI
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Latek	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	262.596.019,00					1 Paket	262.596.019,00	KELURAHAN LATEK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 Paket	644.556.000,00					1 Paket	644.556.000,00	KELURAHAN POGAR
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	342.553.971,00					7 Kali	342.553.971,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Dermo	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	328.695.374,00					7 Kali	328.695.374,00	KELURAHAN DERMO
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Gempeng	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	88.387.750,00					7 Kali	88.387.750,00	KELURAHAN GEMPENG
			7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kalianyar	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	53.114.900,00					7 Kali	53.114.900,00	KELURAHAN KALIANYAR
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kalirejo	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	313.683.120,00					7 Kali	313.683.120,00	KELURAHAN KALIREJO
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kauman	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	269.444.963,00					7 Kali	269.444.963,00	KELURAHAN KAUMAN
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kersikan	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	170.493.460,00					7 Kali	170.493.460,00	KELURAHAN KERSIKAN
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	218.558.100,00					7 Kali	218.558.100,00	KELURAHAN KIDULDALEM
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kolursari	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	171.575.100,00					7 Kali	171.575.100,00	KELURAHAN KOLURSARI
			7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Latek	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						7 Kali	270.531.150,00					7 Kali	270.531.150,00	KELURAHAN LATEK
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Pogar	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan						7 Kali	38.093.500,00					7 Kali	38.093.500,00	KELURAHAN POGAR
Meningkatnya ketentraman dan stabilitas Masyarakat Kecamatan		Porsentase Konflik yang tertangani di Wilayah Kecamatan						n/a	0,00	n/a	0,00	100%	1.415.953.028,00				100%	1.415.953.028,00	KECAMATAN BANGIL
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Porsentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas							100%	1.415.953.028,00					100%	1.517.695.528,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Fasilitas dan Koordinasi						100%	1.411.345.778,00					100%	1.411.345.778,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kecamatan						1 Kali	53.168.550,00					1 Kali	53.168.550,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	-					11 Kali	-	KECAMATAN BANGIL
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	131.124.500,00					11 Kali	131.124.500,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Dermo	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	122.305.000,00					11 Kali	122.305.000,00	KELURAHAN DERMO
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Gempeng	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	133.467.500,00					11 Kali	133.467.500,00	KELURAHAN GEMPENG
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kalianyar	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	121.871.750,00					11 Kali	121.871.750,00	KELURAHAN KALIANYAR
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kalirejo	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	121.402.700,00					11 Kali	121.402.700,00	KELURAHAN KALIREJO
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kauman	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	119.297.200,00					11 Kali	119.297.200,00	KELURAHAN KAUMAN
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kersikan	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	120.809.000,00					11 Kali	120.809.000,00	KELURAHAN KERSIKAN
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	124.426.500,00					11 Kali	124.426.500,00	KELURAHAN KIDULDALEM
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kolorsari	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	121.254.500,00					11 Kali	121.254.500,00	KELURAHAN KOLORSARI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Latek	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	118.283.128,00					11 Kali	118.283.128,00	KELURAHAN LATEK
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pogar	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan						11 Kali	123.935.450,00					11 Kali	123.935.450,00	KELURAHAN POGAR
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi						100%	-					100%	-	KECAMATAN BANGIL
			7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/ Sosialisasi/ Pembinaan						0	-					15 Kali	-	KECAMATAN BANGIL
			7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi						100%	4.607.250,00					100%	106.349.750,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.04.2.04.01	Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/ Sosialisasi/ Pembinaan						1 Kali	4.607.250,00					1 Kali	106.349.750,00	KECAMATAN BANGIL
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah		Nilai Setiap Kecamatan					n/a	0,00	n/a	0,00	70	9.612.332.495,00	76		80		80	9.612.332.495,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan						100%	9.612.332.495,00					100%	9.612.332.495,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100%	8.889.181.545,00					100%	8.889.181.545,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						62 Pegawai/ Bulan	8.360.701.545,00					62 Pegawai/ Bulan	8.360.701.545,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan						19 Orang/ Bulan	469.200.000,00					19 Orang/ Bulan	469.200.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan, dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa						10 Orang/ Bulan	59.280.000,00					10 Orang/ Bulan	59.280.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian						100%	31.352.000,00					100%	31.352.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas						1 Jenis	11.352.000,00					5 Jenis	11.352.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah diklat Pegawai yang di ikuti						2 Kali	20.000.000,00					6 Kali	20.000.000,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										unit Kerja Penanggung Jawab			
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						100%	193.844.870,00						100%	193.844.870,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Pembelian alat-alat listrik/ elektronik						-	-						2 Paket	-	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1 Kali	40.588.670,00						1 Kali	40.588.670,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor						3 Paket	22.991.600,00						3 Paket	22.991.600,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan Dokumen						4 Jenis 30000 Lbr	15.676.600,00						4 Jenis 30000 Lbr	15.676.600,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu						12 Kali	-						12 Kali	-	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Koordinasi dan Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas						12 Kali 12 Kali	114.588.000,00						12 Kali 12 Kali	114.588.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah						100%	229.323.920,00						100%	229.323.920,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1 Unit	36.190.000,00						1 Unit	36.190.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubeleir	Jumlah Pengadaan Meubeleir						3 Jenis	44.900.000,00						3 Jenis	44.900.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3 Jenis	80.988.760,00						3 Jenis	80.988.760,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung						3 Paket	67.245.160,00						3 Paket	67.245.160,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						100%	86.483.760,00						100%	86.483.760,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran tagihan Rekening Listrik, Air, dan Gas						10 Rekening/ bulan	86.483.760,00						10 Rekening/ bulan	86.483.760,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah						100%	182.146.400,00						100%	182.146.400,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional dan Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara						6 Unit 6 Unit	97.238.300,00						6 Unit 6 Unit	97.238.300,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara						3 Jenis	11.443.500,00						3 Jenis	11.443.500,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang terpelihara/ Rehab						2 Paket	73.464.600,00						2 Paket	73.464.600,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Wides	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Porsentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas					n/a	0,00	n/a	0,00	87,5			88	2.260.634.262,00	88,5	2.486.697.688,20	88,5	4.747.331.950,20	KECAMATAN BANGIL
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK												2.260.634.262,00		2.486.697.688,20		4.747.331.950,20	KECAMATAN BANGIL
		7.01.02.0.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan												2.192.976.462,00		2.412.274.108,20		4.605.250.570,20	KECAMATAN BANGIL
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerahdan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan										15 Laporan	28.040.250,00	15 Laporan	30.844.275,00	30 Laporan	58.884.525,00	KECAMATAN BANGIL
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bedomungal	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12 Dokumen	179.588.730,00	12 Dokumen	197.547.603,00	24 Dokumen	377.136.333,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dermo	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12 Dokumen	188.826.861,00	12 Dokumen	207.709.547,10	24 Dokumen	396.536.408,10	KELURAHAN DERMO
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gempeng	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12 Dokumen	209.106.420,00	12 Dokumen	230.017.062,00	24 Dokumen	439.123.482,00	KELURAHAN GEMPENG
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kallanyar	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12 Dokumen	194.587.425,00	12 Dokumen	214.046.167,50	24 Dokumen	408.633.592,50	KELURAHAN KALLANYAR
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalirejo	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12 Dokumen	188.108.780,00	12 Dokumen	206.919.658,00	24 Dokumen	395.028.438,00	KELURAHAN KALIREJO
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12 Dokumen	186.190.200,00	12 Dokumen	204.809.220,00	24 Dokumen	390.999.420,00	KELURAHAN KAUMAN
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kersikan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12 Dokumen	194.587.740,00	12 Dokumen	214.046.514,00	24 Dokumen	408.634.254,00	KELURAHAN KERSIKAN
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12 Dokumen	225.187.736,00	12 Dokumen	247.706.509,60	24 Dokumen	472.894.245,60	KELURAHAN KIDULDALEM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										unit Kerja Penanggung Jawab			
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolursari	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								12 Dokumen	203.650.540,00	12 Dokumen	224.015.594,00	24 Dokumen	427.666.134,00	KELURAHAN KOLURSARI	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Latek	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								12 Dokumen	188.636.820,00	12 Dokumen	207.500.502,00	24 Dokumen	396.137.322,00	KELURAHAN LATEK	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pogar	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								12 Dokumen	206.464.960,00	12 Dokumen	227.111.456,00	24 Dokumen	433.576.416,00	KELURAHAN POGAR	
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										67.657.800,00		74.423.580,00		142.081.380,00	KECAMATAN BANGIL	
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								4 Laporan	67.657.800,00	3 Laporan	74.423.580,00	7 Laporan	142.081.380,00	KECAMATAN BANGIL	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Porsentase Desa/ Kelurahan yang telah dibina						n/a	0,00	n/a	0,00	58%		58%	6.839.480.250,00	60%	7.545.428.275,00	60%	14.384.908.525,00	KECAMATAN BANGIL	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												6.839.480.250,00		7.545.428.275,00		14.384.908.525,00	KECAMATAN BANGIL	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												170.024.500,00		87.026.950,00		257.051.450,00	KECAMATAN BANGIL	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										14 Laporan	170.024.500,00	4 Laporan	87.026.950,00	18 Laporan	257.051.450,00	KECAMATAN BANGIL	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												6.669.455.750,00		7.336.401.325,00		14.005.857.075,00	KECAMATAN BANGIL	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun											3 Unit	256.078.000,00	3 Unit	281.685.800,00	6 Unit	537.763.800,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun											3 Unit	386.214.528,80	3 Unit	424.835.980,80	6 Unit	811.050.508,80	KELURAHAN DERMO
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun											3 Unit	460.876.920,00	3 Unit	506.964.612,00	6 Unit	967.841.532,00	KELURAHAN GEMPENG
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun											3 Unit	536.099.627,00	3 Unit	589.709.589,70	6 Unit	1.125.809.216,70	KELURAHAN KALIANYAR
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun											3 Unit	527.581.182,00	3 Unit	580.339.300,20	6 Unit	1.107.920.482,20	KELURAHAN KALIREJO

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun								3 Unit	487.807.417,00	3 Unit	536.588.158,70	6 Unit	1.024.395.575,70	KELURAHAN KAUMAN
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun								3 Unit	500.753.433,00	3 Unit	550.828.776,30	6 Unit	1.051.582.209,30	KELURAHAN KERSIKAN
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun								3 Unit	450.553.378,00	3 Unit	495.608.715,80	6 Unit	946.162.093,80	KELURAHAN KIDULDALEM
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun								3 Unit	466.393.962,00	3 Unit	513.033.358,20	6 Unit	979.427.320,20	KELURAHAN KOLURSARI
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun								3 Unit	471.024.414,00	3 Unit	518.126.855,40	6 Unit	989.151.269,40	KELURAHAN LATEK
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun								3 Unit	405.052.246,00	3 Unit	445.557.470,60	6 Unit	850.609.716,60	KELURAHAN POGAR
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	352.277.700,00	1 Pokmas	387.505.470,00	2 Pokmas	739.783.170,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	217.197.613,00	1 Pokmas	238.917.374,30	2 Pokmas	456.114.987,30	KELURAHAN DERMO
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gempeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	141.725.000,00	1 Pokmas	155.897.500,00	2 Pokmas	297.622.500,00	KELURAHAN GEMPENG
			7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kallanyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	77.265.730,00	1 Pokmas	84.992.303,00	2 Pokmas	162.258.033,00	KELURAHAN KALLANYAR
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	75.592.800,00	1 Pokmas	83.152.080,00	2 Pokmas	158.744.880,00	KELURAHAN KALIREJO
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	122.145.000,00	1 Pokmas	134.359.500,00	2 Pokmas	256.504.500,00	KELURAHAN KAUMAN
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kersikan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	109.032.000,00	1 Pokmas	119.935.200,00	2 Pokmas	228.967.200,00	KELURAHAN KERSIKAN
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	153.501.500,00	1 Pokmas	168.851.650,00	2 Pokmas	322.353.150,00	KELURAHAN KIDULDALEM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kolursari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	140.757.000,00	1 Pokmas	154.832.700,00	2 Pokmas	295.589.700,00	KELURAHAN KOLURSARI
			7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Latek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	134.165.400,00	1 Pokmas	147.581.940,00	2 Pokmas	281.747.340,00	KELURAHAN LATEK
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pogar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								1 Pokmas	197.360.900,00	1 Pokmas	217.096.990,00	2 Pokmas	414.457.890,00	KELURAHAN POGAR
			7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)												22.000.000,00		22.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Bendomungal)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dermo)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN DERMO
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Gempeng)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN GEMPENG
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kaliyanyar)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN KALIYANYAR
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kalirejo)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN KAUREJO
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kauman)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN KAUMAN
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kersikan)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN KERSIKAN
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kiduldalem)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN KIDULDALEM
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kolursari)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN KOLURSARI
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Latek)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN LATEK
			7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Pogar)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN POGAR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										unit Kerja Penanggung Jawab				
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											-	100.000.000,00		100.000.000,00	KECAMATAN BANGIL		
			7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Katahan Pangan Keluarga									0 Keluarga	-	30 Keluarga	25.000.000,00	30 Keluarga	25.000.000,00	KECAMATAN BANGIL	
			7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									0 Keluarga	-	30 Keluarga	25.000.000,00	30 Keluarga	25.000.000,00	KECAMATAN BANGIL	
			7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									0 Keluarga	-	30 Keluarga	25.000.000,00	30 Keluarga	25.000.000,00	KECAMATAN BANGIL	
			7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas									0 Keluarga	-	30 Keluarga	25.000.000,00	30 Keluarga	25.000.000,00	KECAMATAN BANGIL	
				Posentase Konflik yang tertangani di Wilayah Kecamatan			n/a		n/a		100%		100%	583.025.300,00	100%	98.000.000,00	200%	681.025.300,00	KECAMATAN BANGIL		
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												583.025.300,00		98.000.000,00	681.025.300,00	KECAMATAN BANGIL	
			7.01.02.0.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum												558.025.400,00		70.000.000,00	628.025.400,00	KECAMATAN BANGIL	
			7.01.02.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									15 Laporan		15 Laporan	119.250.000,00	50.000.000,00	30 Laporan	169.250.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									1 Laporan		1 Laporan	44.016.200,00	20.000.000,00	2 Laporan	64.016.200,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									1 Laporan		0 Laporan	34.118.000,00	-	2 Laporan	34.118.000,00	KELURAHAN BENDOMUNGAL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Dermu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	38.867.400,00	0 Laporan	-	1 Laporan	38.867.400,00	KELURAHAN DERMO
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Gempeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	39.910.000,00	0 Laporan	-	1 Laporan	39.910.000,00	KELURAHAN GEMPENG
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kalianyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	29.070.000,00	0 Laporan	-	1 Laporan	29.070.000,00	KELURAHAN KALIANYAR
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kalirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	39.150.000,00	0 Laporan	-	1 Laporan	39.150.000,00	KELURAHAN KALIREJO
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kauman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	32.713.200,00	0 Laporan	-	1 Laporan	32.713.200,00	KELURAHAN KAUMAN
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kersikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	32.713.200,00	0 Laporan	-	1 Laporan	32.713.200,00	KELURAHAN KERSIKAN
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	36.000.000,00	0 Laporan	-	1 Laporan	36.000.000,00	KELURAHAN KIDULDALEM
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kolursari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	35.025.000,00	0 Laporan	-	1 Laporan	35.025.000,00	KELURAHAN KOLURSARI
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Latek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	37.200.000,00	0 Laporan	-	1 Laporan	37.200.000,00	KELURAHAN LATEK
			7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pogar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1 Laporan	39.992.400,00	0 Laporan	-	1 Laporan	39.992.400,00	KELURAHAN POGAR
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Daerah										24.999.900,00		28.000.000,00		52.999.900,00	KECAMATAN BANGIL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab			
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			7.01.04.2.02.01	Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									1 Laporan	24.999.900,00	1 Laporan	28.000.000,00	2 Laporan	52.999.900,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Daerah											-		-		-	
			7.01.04.2.04.01	Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan					n/a	0,00	n/a	0,00	70		76	9.687.390.065,00	80	10.646.722.521,50	80	20.334.112.586,50	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9.687.390.065,00		10.646.722.521,50		20.334.112.586,50	KECAMATAN BANGIL
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												9.041.346.433,00		9.945.681.076,30		18.986.827.509,30	KECAMATAN BANGIL
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN									62 Orang/ Bulan	8.485.009.441,00	62 Orang/ Bulan	9.333.510.385,10	62 Orang/ Bulan	17.818.519.826,10	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									12 Dokumen	501.916.992,00	12 Dokumen	552.108.691,20	24 Dokumen	1.054.025.683,20	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD									4 Dokumen	54.420.000,00	4 Dokumen	59.862.000,00	8 Dokumen	114.282.000,00	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												50.615.400,00		55.676.940,00		106.292.340,00	KECAMATAN BANGIL
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									2 Paket	30.615.400,00	2 Paket	33.676.940,00	4 Paket	64.292.340,00	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	22.000.000,00	8 Orang	42.000.000,00	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												181.940.212,00		190.727.683,20		372.667.895,20	KECAMATAN BANGIL
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan									1 Paket	19.460.500,00	1 Paket	12.000.000,00	2 Paket	31.460.500,00	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan									3 Paket	10.438.722,00	2 Paket	11.482.594,20	5 Paket	21.921.316,20	KECAMATAN BANGIL	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan									2 Paket	24.807.590,00	2 Paket	27.288.349,00	4 Paket	52.095.939,00	KECAMATAN BANGIL	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										unit Kerja Penanggung Jawab			
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023			kondisi kinerja pada akhir periode renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan									2 Paket	11.367.900,00	2 Paket	12.504.690,00	4 Paket	23.872.590,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.06.08	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu									12 Laporan	4.330.500,00	12 Laporan	4.763.550,00	24 Laporan	9.094.050,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									12 Laporan	111.535.000,00	12 Laporan	122.688.500,00	24 Laporan	234.223.500,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											154.260.920,00		169.687.012,00		323.947.932,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan									1 Unit	36.300.000,00	1 Unit	39.930.000,00	2 Unit	76.230.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan									30 Unit	23.100.000,00	3 Unit	25.410.000,00	33 Unit	48.510.000,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan									4 Unit	86.445.920,00	4 Unit	95.090.512,00	8 Unit	181.536.432,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan									2 Unit	8.415.000,00	2 Unit	9.256.500,00	2 Unit	17.671.500,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											116.988.000,00		128.686.800,00		245.674.800,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan									12 Laporan	116.988.000,00	12 Laporan	128.686.800,00	24 Laporan	245.674.800,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											142.239.100,00		156.463.010,00		298.702.110,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya									7 Unit	102.165.800,00	8 Unit	112.382.380,00	15 Unit	214.548.180,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara									5 Unit	8.749.700,00	5 Unit	9.624.670,00	10 Unit	18.374.370,00	KECAMATAN BANGIL
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi									1 Unit	31.323.600,00	1 Unit	34.455.960,00	2 Unit	65.779.560,00	KECAMATAN BANGIL
				JUMLAH				15.632.465.000,00		13.420.562.928,75		20.666.953.979,00		19.370.529.877,00		20.776.848.484,70		60.814.332.340,70		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Bangil mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 pada tabel sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya indikator kinerja Kecamatan Bangil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagaimana berikut :

Tabel 7.1
Target, Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				TAHUN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas	n/a	n/a	n/a	87.50%	88%	88,50%	88,50%
2		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	n/a	n/a	n/a	55%	58%	60%	60%
3		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
4		Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	n/a	63,36	69	70	76	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Bangil Periode 2018-2023 dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah. Disamping itu, juga sebagai pedoman dan acuan yang dapat dijadikan landasan kerja Camat, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, adanya keserasian dan kesatuan dalam gerak dan langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Bangil.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerahselama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Bangil disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan P-RPJMD Kabupaten Pasuruan.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Program Kerja saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Program Kerja yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kecamatan Bangil kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF